

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TEHADAP
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM-MP) MANDIRI PEDESAAN DI DESA ANGALLE
KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA**

8

Oleh: Nasrullah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Dasar penelitian yang digunakan adalah *Field Research* dengan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi indikator penelitian pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dapat dilihat 1) Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, 2) Jenis mamfaat yang diterima oleh target groups, 3) Se jauh mana perubahan yang di inginkan dari sebuah kebijakan, 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat, 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan imeplementornya dengan rinci, dan 6) Apakah sebuah program di dukung oleh sumberdaya yang memadai. Penelitian bertujuan mengetahui mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran kabupaten Luwu Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Temuan penelitian Kebijakan dari PNPM-MP dalam meningkatkan kesejatraan masyarakat khususnya di Desa Mangalle sudah berjalan dengan baik terutama dalam segi pemberdayaan masyarakatnya dan pemberdayaan ekonomi,

Kata Kunci : *Implementasi, PNPM, Pedesaan, Pemberdayaan*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pementauan dan evaluasi. melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat di tumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan (Pedoman Umum PNPM, 2007).

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan; dan percepatan pembangunan Daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca benca dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat –pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/ sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa –desa tertinggal.

Penintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat kedalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah – daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama

ini sering berduplikasi antara proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5 – 6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang – kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target wujud pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator – indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target – target MDGs tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian Deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui a) observasi, kegiatan yang dilakukan mengamati implementasi Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, b) Wawancara mendalam (*indept interview*) mencari informasi secara mendetail dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengambilan informan menurut Sugiono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya penentuan sampel informan ditentukan secara sengaja oleh peneliti sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Hamidi (2008: 96) menganalisis data maksudnya adalah menetapkan tahap- tahap, langkah- langkah kegiatan terhadap yang sedang dan sudah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 209-210) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu (1) reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Penarikan kesimpulan (verifikasi).

HASIL PENELITIAN

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa ada berapa program yang berhasil dilaksanakan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada tahun 2010 s/d 2011 di antaranya: 1) pembuatan jalan kantong produksi, 2) perluasan jalan desa dan pengaspalan, 3) pembuatan gedung sekolah TK.

Dari berapa kegiatan yang telah terlaksana semuanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat Desa Mangalle, seperti pembuatan jalan kantong produksi masyarakat memiliki kepentingan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang lebih baik maka mereka mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan pembuatan jalan kantong produksi guna membantu dalam proses transportasi ke kebun agar hasil pertanian mereka memiliki nilai ekonomi sesuai yang mereka harapkan. Sedangkan perluasan jalan desa dan pengaspalan ini pun merupakan dari kepentingan masyarakat, karena setiap tahunnya dengan bertambahnya jumlah penduduk sedangkan pemukiman warga makin sempit maka masyarakat dan aparat pemerintah menyatuhkan pendapat untuk mengadakan perluasan desa agar tidak terjadi kepadatan penduduk, sedangkan mengenai pengaspalan jalan ini pun tidak terlepas dari kepentingan dari masyarakat desa.

Berikut pernyataan dari masyarakat yang diwawancarai atas nama Wahida pada 20 Desember 2012 menyatakan sebagai berikut:

“Kami sangat bersyukur sekali kepada Allah SWT berkat adanya bantuan dari pemerintah melalui program PNPM kami sudah bisa ke kebun naik motor dan mengangkat hasil panen coklat kami dengan mudah.”

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa semua program yang di laksanakan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) memiliki kepentingan dan orang – orang yang berkepentingan di dalamnya adalah pemerintah dan masyarakat serta Tim penyelenggara kegiatan.

2. Jenis Manfaat yang di terima oleh target group

Dalam setiap kegiatan atau program yang akan di rencanakan dan di laksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh PNPM mandiri sendiri, semua berharap agar program yang telah di rencanakan akan terlaksana dengan baik sesuai yang di harapkan oleh masyarakat agar dapat bermamfaat bagi masyarakat maupun pemerintah desa serta penyelenggara kegiatan PNPM mandiri perdesaan.

Berikut pernyataan dari masyarakat yang Bapak Evi yang diwawancarai pada tgl 21 Desember 2012 adalah:

“Manfaat yang saya terima dengan adanya PNPM memudahkan transportasi menuju kebun serta hasil kebun makin meningkat, penghasilan kebun kami digunakan untuk keperluan sehari-hari serta ditabung untuk biaya sekolah anak kami”.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan program PNPM sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan hasil produksi kebun dan memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga serta menabung untuk keperluan masa depan anak.

3. Sejauh mana Perubahan yang di Inginkan dari sebuah kebijakan

Derajat perubahan yang diinginkan sebagai dimensi program untuk menjadi yang di laksanakan pengukur terlaksananya program dan mekihat seberapa besar perubahan dari sebelum adanya program dengan setelah danya program. Wawancara penulis dengan aparat desa atas nama Bapak Dilla pada tgl 24 Desember berikut ini:

“kalau di tanyakan tentang derajat perubahan jelas memiliki perubahan yang sangat besar ya, alhamdulillah dengan adanya PNPM ini sudah banyak perubahan yang terjadi di masyarakat Desa Mangalle terutama dalam bidang pemberdayaan sangat membantu dalam meningkatnya taraf hidup masyarakat, terus dengan adanya program yang terlaksana semua mengalami derajat perubahan signifikan dari sebelumnya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa derajat perubahan yang di inginkan baik dari pemerintah maupun masyarakat serta tim penyelenggara kegiatan dalam segi pembangunan fisik sudah mengalami perubahan yang signifikan dari sebelumnya, namun dalam segi pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan program dan tujuan PNPM yang katanya rumah tangga miskin terutama akan menjadi sasaran utama PNPM terutama dalam pemberdayaan, namun derajat yang di inginkan oleh masyarakat belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Karena dalam segi pembagian modal usaha atau SPP ini tidak merata hanya kelompok – kelompok tertentu saja yang mendapatkan sedangkan kelompok yang lain tidak perna mendapat dan bahkan merasakan dari program SPP tersebut.

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat

Dalam pembuatan kebijakan masyarakat desa terutama dari rumah tangga miskin merupakan sasaran dari PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. Sedangkan pelaku – pelaku lainnya dari aparat dan konsultan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pembuatan kebijakan yang ada di PNPM Mandiri Perdesaan mari kita simak jawaban dari sala satu masyarakat yang penulis wawancarai yang bernama Azwar yang diwawancarai pada tgl 26 November 2012 berikut pernyataannya:

“ Program yang telah dibuat oleh tim fasilitator PNPM sudah tepat seperti dengan program pembuatan jalan kantong produksi sangat membantu masyarakat. Kami sebagai masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya program tersebut sebab memudahkan akses jalan menuju kebun serta membawa hasil pertanian kami seperti coklat, durian dan langsung dengan mudah dan cepat. ”.

Hal senada disampaikan oleh Sarmna (kepala desa Mangalle) mengatakan bahwa:

“Proses pembuatan kebijakan selalu melibatkan masyarakat sebab program-program PNPM bertujuan untuk meningkatkan tarap hidup. Rata-rata program yang ditawarkan oleh fasilitator PNPM selalu direspon baik oleh masyarakat sebab program sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tepat sasaran”

Pernyataan ditersebut di atas memperlihatkan bahwa dalam program yang telah dibuat tepat sasaran sebab program tersebut sangat banyak menyentuh masyarakat. Dalam proses pembuatan kebijakan tersebut di atas sangat jelas bahwa pelaku utama adalah masyarakat, dalam artian bahwa masyarakat terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya hingga pelestariannya, jadi sangat jelas bahwa program PNPM Mandiri Perdesaan ini betul – betul melibatkan langsung masyarakat serta memerintah desa dan pengurus PNPM Mandiri Perdesaan lainnya, serta pembuatan kebijakannya pun di desa tersebut sehingga mudah di jangkau dan pengontrolnya pun mudah .

5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

Disetiap pelaksana kegiatan pemerintah desa bersama – sama dengan pengurus PNPM hanya memfasilitasi saja, namun pelaksana pogram adalah masyarakat, masyarakat adalah pelaksana utama dalam melakukan program di bantu oleh 2 kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan aparat desa serta organisasi keperempuanan. Dalam hal ini di setiap pelaksanaan kegiatan masyarakatlah yang akan berperan aktif.

Wawancara penulis dengan warga masyarakat Desa Mangalle yang bernama Karim pada tgl November 23 No 2012 berikut pernyataannya:

“iya kita disini khususnya Desa Mangalle semenjak adanya PNPM Mandiri Perdesaan ini setiap pelaksanaan kegiatan itu masyarakat turun langsung sebagai pelaksana kegiatan dari beberapa program yang sudah selesai di laksanakan alhamdulillah semua berkat keterlibatan masyarakat”.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat dan organisasi perempuan (PKK) adalah sebagai pelaksana utama kegiatan, sedangkan kepala desa bertugas sebagai pembina masyarakat dalam melaksanakan kegiatan,

sedangkan petugas dari PNPM Mandiri Perdesaan hanya memfasilitasi berjalannya kegiatan.

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai

Sumber daya yang dikerahkan dalam hal ini adalah masyarakat seperti dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui program – program yang terlaksana misalnya program pembuatan jalan kantong produksi, pembangunan gedung sekolah TK, perluasan desa, penambahan pipa dan meteran air. Selain masyarakat ada juga sumber daya alam berupa materil misalnya: pasir, air, batu, kayu serta sarana sarana dan prasarana lainya yang di gunakan oleh masyarakat untuk tercapainya program yang akan di laksanakan.

Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak, maka penulis menbatasi pada dimensi pelaksanaan program yang dapat memuaskan masyarakat miskin Desa Mangalle melalui yakni :

1. Pemberdayaan sosial dapat dilihat adanya pemberdayaan perempuan melalui sosialisasi serta pemberian modal seperti program SPP guna memberdayakan perempuan melalui usaha yang mereka mulai lakukan dengan adanya SPP, dan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan.
2. Pemberdayaan ekonomi dapat dilihat PNPM sangat berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terutama pada perempuan atau ibu rumah tangga, yaitu pemberian dana, yang namanya dana simpan pinjam perempuan (SPP). ini tujuannya adalah pemberian modal usaha kecil – kecilan kepada ibu – ibu rumah tangga agar perempuan pun merasa dilibatkan dan di berdayakan dalam segi perekonomian dengan cara para ibu – ibu di berikan arahan dan kemudian mereka di berikan modal sesuai dengan permintaan kelompok agar dana yang di berikan kepada mereka dapat mereka kelola sebaik mungkin dan akan ada pengembaliannya setiap bulan dengan bunga 2%, program PNPM ini sangat menunjang ekonomi ibu rumah tangga dan masyarakat umumnya.

PENUTUP

Setelah melakukan analisis terhadap data yang di peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan pembahasan mengenai implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mangalle Kec. Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

Kebijakan dari PNPM-MP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Mangalle sudah berjalan dengan baik terutama dalam segi pemberdayaan masyarakatnya serta pemberdayaan ekonomi PNPM sangat berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terutama pada perempuan atau ibu rumah tangga, yaitu pemberian dana, yang namanya dana simpan pinjam perempuan (SPP)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, syukur, 1988, *implementasi kebijakan*, gamedia. jakarta
- Dunn, Willam N,1999, *pengantar analisis kebijakan public*, gaja mada university press,Yogyakarta
- Effendy, sofyan, 2000, *implementasi dan evaluasi kebijakan public* (materi kuliah MAP),Fakultas MAP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Islamy,Irfan,1984,*prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*,bina aksara,
- Sugiyono 2006. Metode Penelitian Administrasi, Bandung, CV Alfabeta
- William N.Dunn,19994,*Evaluasi kebijakan Publik*, Rajawali Press,Jakarta.
- ,2000, *pengantar analisis kebijakan public*,edisi ke dua,yogyakarta: Media presindo
- Wibawa,Samodra dkk,1994,*Evaluasi kebijakan public*, PT Raja Garfindo Persada,Jakarta.

Dokumen

- Undang – Undang Dasar 1945 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial.
- UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
- UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional
- UU No.23 Tahun 2005 tentang pemerintah daerah